

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Menurut hukum internasional, penyelesaian klaim Laut Natuna memiliki konsekuensi yang signifikan dan luas terhadap keamanan Asia Tenggara. Klaim tumpang tindih antara Indonesia dan negara-negara seperti China, yang mengajukan klaim berdasarkan "Sembilan Garis Putus", menunjukkan kesulitan yang signifikan dalam penerapan dan pelaksanaan hukum internasional di bidang maritim. Penyelesaian klaim ini dapat berdampak besar pada kebijakan diplomatik, pengelolaan konflik non-militer, dan stabilitas keamanan.

Pertama, penyelesaian klaim Laut Natuna dapat berdampak besar pada stabilitas keamanan regional. Konflik bersenjata dapat muncul sebagai akibat dari konflik maritim ini, terutama ketika negara-negara memiliki klaim teritorial yang bertentangan yang memaksa mereka untuk menempatkan kekuatan militer mereka di wilayah yang dipersengketakan. Kehadiran kapal perang dan pesawat tempur yang lebih besar di daerah dapat meningkatkan ketegangan dan meningkatkan kemungkinan bentrokan yang tidak disengaja. Ketidakstabilan ini dapat menyebabkan peningkatan biaya pertahanan, perlombaan senjata, dan gangguan pada kerjasama ekonomi regional yang sangat penting untuk kemajuan dan integrasi regional. Ini menunjukkan bahwa bagaimana klaim teritorial diselesaikan dan bagaimana negara-negara terkait menangani masalah ini sangat memengaruhi stabilitas keamanan regional.

Kedua, kebijakan diplomatik dan hubungan internasional dipengaruhi oleh penyelesaian sengketa ini. Penyelesaian yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional dan hasilnya menguntungkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang patuh pada hukum internasional dan meningkatkan reputasinya di seluruh dunia. Sebaliknya, jika negara lain, seperti China, tidak puas dengan keputusan internasional, hal itu dapat memperburuk hubungan diplomatik dan memengaruhi kerjasama di banyak bidang, seperti perdagangan dan investasi.

Akibatnya, untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara penting sambil mempertahankan kepentingan nasionalnya, Indonesia harus berhati-hati dalam menggunakan diplomatik.

Ketiga, cara penting untuk mencegah dan menyelesaikan konflik adalah melalui diplomasi, mekanisme hukum internasional, dan kerjasama regional. Aktif berdiplomasi dan menggunakan mekanisme hukum internasional dapat membantu meredakan ketegangan dan membuat kerangka kerja yang mendukung penyelesaian sengketa secara damai. Perjanjian pengelolaan bersama dan forum internasional meningkatkan kepercayaan dan mengurangi risiko konflik. Dalam situasi seperti ini, pengelolaan konflik non-militer yang efektif menghasilkan keamanan regional yang lebih kuat dan teratur.

Selain itu, koordinasi regional dan konsekuensi ekonomi dari penyelesaian konflik maritim Natuna sangat penting. Hasil dari solusi ini dapat meningkatkan kerja sama lintas batas antara Indonesia dan negara-negara tetangganya, serta mendorong kerja sama regional dalam hal pengawasan dan patroli maritim. Sangat penting untuk menyelesaikan sengketa ini karena wilayah ini memiliki banyak sumber daya alam, terutama cadangan gas alam. Ini akan memastikan keamanan maritim yang stabil, eksploitasi sumber daya yang berkelanjutan, dan investasi yang menguntungkan di bidang energi dan infrastruktur terkait. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya yang baik dan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga keamanan dan stabilitas ekonomi di wilayah tersebut.

Dalam mengatasi konflik maritim di Natuna, pertimbangan lingkungan sangat penting. Eksploitasi sumber daya yang berkelanjutan dan perlindungan ekosistem laut yang beragam harus menjadi prioritas utama. Membantu menegakkan kedaulatan maritim Indonesia dan menyelesaikan klaim maritim Natuna secara damai dapat dicapai melalui kerja sama internasional melalui pendekatan multilateral, yang melibatkan ASEAN serta negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Untuk menjaga wilayah maritim dan stabilitas regional, Indonesia harus mematuhi hukum internasional, terutama UNCLOS 1982.

Secara keseluruhan, penyelesaian klaim Laut Natuna memiliki dampak signifikan terhadap keamanan regional. Pengelolaan yang hati-hati dan strategi

yang terintegrasi dalam aspek diplomatik, hukum internasional, dan pertahanan akan menentukan apakah hasil penyelesaian akan memperkuat stabilitas kawasan atau memperburuk ketegangan. Dengan pendekatan yang berimbang dan berbasis pada hukum internasional, negara-negara yang terlibat dapat meminimalkan risiko konflik, menjaga keamanan regional, dan mempromosikan kerjasama yang konstruktif untuk masa depan yang lebih stabil di Asia Tenggara.

6.2 Saran

Studi ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan keamanan maritim sekitar Natuna. Pertama, penyelesaian sengketa maritim secara damai didasarkan pada hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982. Dengan menyelesaikan tuntutan ini, Indonesia menjaga kedaulatan maritimnya dan memperkuat legitimasi patroli di Natuna. Selain itu, ini akan menurunkan risiko seperti perdagangan manusia, narkoba, dan tindakan ilegal lainnya. Kerja sama internasional dan koordinasi regional juga sangat penting. Indonesia harus meningkatkan hubungannya dengan negara-negara tetangganya, mitra internasional seperti ASEAN, dan forum keamanan maritim regional lainnya, untuk menjamin stabilitas dengan pengawasan dan penegakan hukum yang terkoordinasi serta meningkatkan patroli bersama.

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam penyelesaian konflik Natuna. Dengan melakukan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memastikan eksploitasi sumber daya secara bijaksana dan berkelanjutan, yang akan memberikan keamanan maritim dalam jangka panjang. Selain akan memastikan keamanan Indonesia, penyelesaian konflik ini akan membangun fondasi yang kuat untuk kerja sama regional yang lebih luas dalam menghadapi tantangan keamanan di Asia Tenggara. Indonesia dapat lebih proaktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut dengan mendukung strategi multilateral dan mematuhi hukum internasional.